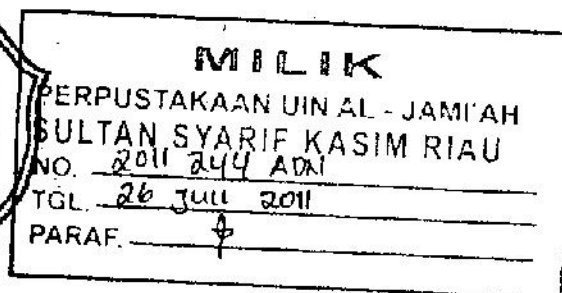
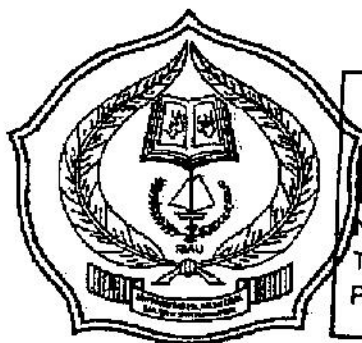


SKRIPSI

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Pada Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial



Disusun Oleh

HASBI

NIM. 10675005071

PROGRAM SI

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
RIAU
2011**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

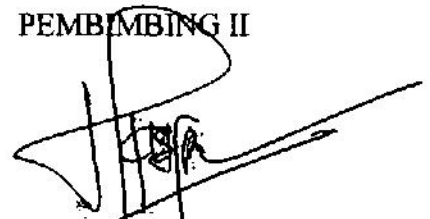
NAMA : HASBI
NIM : 10675005071
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
**JUDUL : ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DI KECAMATAN MERBAU KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING I


NOPRI AHADI, SE,MM
NIP. 19701108 200801 1 008

PEMBIMBING II


MASHURI
NIK. 13070711

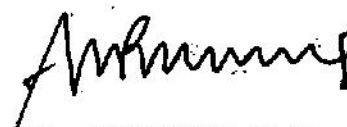
MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL



Dr. ALWAR HARAHAP, M.Si
NIP. 19560202 198403 1 003

KETUA JURUSAN
ADMINISTRASI NEGARA



Drs. ALMASRI, M.Si
NIP. 19670801 200501 1 007

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : HASBI
NIM : 10675005071
TEMPAT/TGL LAHIR : BANTAR/20 DESEMBER 1986
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN KECAMATAN
MEBAU KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI
HARI/TGL UJIAN : JUM'AT/20 MEI 2011

PANITIA PENGUJI

KETUA


Drs. H. RODRI H. NAWAWI, MA
NIP.19480414 197803 1 001

SEKRETARIS



JHON AFRIZAL, MA
NIP.19790911 1201101 1 003

ANGGOTA

PENGUJI I


DR. MAHENDRA ROMUS, SP, M.Ec
NIP.19711119 200501 1 004

PENGUJI II


AFRIZAL S. Sos, M.si
NIP.19690419 200701 1 025

**Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan Merbau
oleh : Hasbi**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan manfaat yang diharapkan adalah agar pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Merbau dapat berjalan dengan efektif dengan adanya dukungan masyarakat berupa partisipasi dalam setiap proses pembangunan. Sebagai indikator penulis mengambil tiga (3) indikator yakni, partisipasi berupa tenaga, partisipasi berupa keahlian, dan partisipasi berupa dana. Analisis data yang dilakukan penulis adalah teknik kualitatif dengan metode teknis analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data kuisioner, observasi, dan interview dengan jumlah sampel 100 orang dari jumlah populasi 5.300 orang. Hasil analisis penelitian ini ditemukan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan dengan baik, dari tanggapan responden yang mengatakan mereka sering berpartisipasi dalam pembangunan sebesar 27,4%, yang menanggapi kadang-kadang saja berpartisipasi sebesar 40% dan yang mengatakan tidak pernah sama sekali ikut berpartisipasi sebesar 32,46% responden. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang arti pembangunan. Dengan demikian diperlukan peran pemerintah dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya arti dari sebuah pembangunan.

Kata kunci : partisipasi berupa tenaga, keahlian, dan dana.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang mana berkat Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya yang penulis beri judul *“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan Merbau”*.

Shalawat dan salam tak lupa pula penulis ucapkan buat Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Semoga shalawat dan salam selau tercurahkan kepada beliau dan para sahabat-sahabatnya dan semoga kita tergolong pada orang-orang ahli surga. Amin.

Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga Allah memberikan ganjaran yang setimpal. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memotivasi baik moril maupun materil, terutama penulis sampaikan kepada :

1. Keluarga tercinta, Ayahanda (Alm. M. Rasyid, AR, BA), Ibunda (Zaidah), dan buat Abang (Syukrillahadi) yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi dan bantuan sehingga skripsi ini terselesaikan.

Kepada Alm. Ayahandaku tercinta skripsi ini ananda persembahkan untuk mu. Karna telah banyak pelajaran yang engkau berikan kepada anakmu ini. Ananda doa kan semoga ayahanda tenang di sisi Allah SWT. Amin.

2. Bapak. Drs. Azwar Harahap, M,Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Drs. Almasri, M.Si, sebagai Ketua Jurusan Administrasi Negara.
4. Bapak Rusdi, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris Jurusan Administrasi Negara yang selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktu demi kesuksesan mahasiswa.
5. Bapak Nopri Ahadi, SE,MM (Pembimbing I) dan Bapak Mashuri, MA (Pembimbing II) yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
7. Terima kasih kepada seluruh pegawai di Kecamatan Merbau yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi demi kelancaran penulisan skripsi ini.

8. Untuk sahabat-sahabatku Abdul Rafik, Rustam, Jhon Hendra, Alfizal, Adrian, Dani Yudistira, Bahtiarsyah, Afri Zulaimi, Ade Zedri, Helmi Herianto, Eka Badri, Harsini, Raja Riana, Desi Satria, Rambun Naldi, Harmion, said Rosdiansyah, abangku Darfi Rahman serta sahabatku ku di kos Ade Indra Putra, Irfan Putra, Edo Putra, Ervan Kurniawan serta seseorang yang telah menjadi motivasi bagi penulis yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini, dan teman-temanku yang senasib dan seperjuangan khususnya Jurusan Administrasi negara angkatan 2006 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Dan seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala amalan dan kebaikan dengan pahala yang setimpal.

Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 13 juni 2011

Penulis

HASBI

DAFTAR ISI

Abstrak

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi	iv
Daftar gambar	vi
Daftar Tabel.....	vii

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 manfaat penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Pembangunan	10
2.2 Pengertian Partisipasi	14
2.3 Hipotesis	24
2.4 Konsep Operasional	24
2.4 Teknik Pengukuran Data	25
2.5 Variabel Penelitian.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	27
3.2 Jenis Penelitian Dan Sumber Data	27
3.4 Populasi dan Sampel	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Analisa Data.....	30

BAB IV GAMBAR UMUM

4.1	Geografi Kecamatan Merbau.....	31
4.2	Pemerintahan Kecamatan Merbau	35

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1	Identitas Responden	41
5.2	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.....	44
5.3	Analisa Indikator Variabel Penelitian	55
5.4	Hambatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.....	59

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1	Kesimpulan.....	62
6.2.	Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	: Sturuktur Organisasi Kantor Camat Merbau.....	40
------------	---	----

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jenis Pembangunan Dan Partisipasi Masyarakat Berupa Tenaga Di Kecamatan Merbau Tahun 2010.....	5
1.2 Jenis pembangunan Dan Partisipasi Masyarakat Berupa Keahlian Di Kecamatan Merbau Tahun 2010	5
1.3 Jenis Pembangunan Dan Partisipasi Masyarakat Berupa Dana Kecamatan Merbau Tahun 2010.....	6
3.1 Keadaan Populasi Dan Sampel.....	29
4.1 Klasifikasi Jumlah Penduduk Di Kecamatan Merbau Menurut Kelompok Umur	32
4.2 Klasifikasi Jumlah Penduduk Di Kecamatan Merbau Menurut Jenis Agama.....	33
4.3 keadaan penduduk menurut mata pencaharian	33
4.4 Keadaan Pendidikan Kecamatan Merbau	34
5.1 Ristribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan.....	42
5.2 Ristribusi Responden Menurut Jenis Kelamin	43
5.3 Ristribusi Responden Menurut Umur	43
5.4 Distribusi Jawaban Responden Tentang Partisipasi Langsung Dalam Kegiatan Pembangunan	45
5.5 Distribusi Jawaban Responden Tentang Peran Aktifmasyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan	45
5.6 Distribusi Jawaban Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Berupa Gotong-Royong	46

5.7	Distribusi Jawaban Responden Tentang Pengawasan Terhadap Penempatan Tenaga Ahli	47
5.8	Distribusi Jawaban Responden Tentang Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan.....	48
5.9	Distribusi Jawaban Responden Tentang Penempatan Tenaga Ahli...	49
5.10	Distribusi Jawaban Responden Tentang Partisipasi Dalam Menyumbang Ide Dalam Pelaksanaan Pembangunan	50
5.11	Distribusi Jawaban Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Mengisi Pembangunan Dalam Berbagai Kegiatan	50
5.12	Distribusi Jawaban Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Program Pembangunan.....	51
5.13	Distribusi Jawaban Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan	51
5.14	Distribusi Jawaban Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Dana	52
5.15	Distribusi Jawaban Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Berupa Barang Atau Alat Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan....	53
5.16	Distribusi Jawaban Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Menyumbang Tanah	54
5.17	Distribusi Jawaban Responden Tentang Sosialisasi Pemerintah Dalam Bentuk Penjelasan Anggaran	54
5.18	Distribusi Jawaban Responden Tentang Kesiediaan Masyarakat Dalam Menyumbang Dana.....	55
5.19	Indikator Partisipasi Berupa Tenaga	56
5.20	Indikator Partisipasi Dalam Bentuk Keahlian.....	57
5.21	Indikator Partisipasi Dalam Bentuk Dana.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional yang telah dilaksanakan pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan didalam dunia yang merdeka dan bersahabat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusunlah suatu pola umum pembangunan jangka panjang guna mengarah dan penyatuan langkah dalam pembinaan dan pengembangan bangsa. Adapun sasaran ini adalah untuk mencapai landasan yang kuat Bangsa Indonesia, sehingga dapat tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri atau daya kemandirian diartikan daya untuk berdiri diatas kaki sendiri dan muncul dari dalam diri tersebut.

Pelaksanaan dari kegiatan pembangunan tersebut merata keseluruh tanah air dan tidak hanya dapat oleh suatu golongan atau sebagian masyarakat saja, tetapi dapat dinikmati oleh seluruh rakyat yang ada berdomisili diseluruh pelosok tanah air serta benar-benar harus dirasakan sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial sebagaimana tujuan dan cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Seperti yang dikemukakan oleh Siagian,(2005: 142) mengatakan bahwa: pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat yang modern.

Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 126 ayat (1) disebutkan bahwa : kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan perda berpedoman pada peraturan pemerintah. Kemudian pasal 126 ayat (2) : ditegaskan lebih lanjut bahwa : kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang dari Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian Otonomi Daerah.

Kepala Wilayah Kecamatan dalam hal ini adalah Camat yang sudah tentu mengharapkan kesuksesan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, tidak mungkin dapat bekerja sendiri tanpa bantuan staf dan partisipasi masyarakat. Dalam bidang pembangunan di Kecamatan Merbau mengharapkan masyarakat memberikan kontribusi yang nyata dalam mewarnai pembangunan yang ada di kecamatan.

Di Era Otonomi Daerah ini, dimana tugas dan tanggungjawab pemerintah semakin berat dengan bertambahnya kewenangan yang dilimpahkan. Secara umum tugas pokok pemerintah meliputi :

1. Pelayanan (*service*) yang membuahkan keadilan dalam masyarakat.
2. Pemberdayaan(*empowerment*) yang mendorong kemandirian masyarakat.

3. Pembangunan (*development*) yang menciptakan kemakmuran dalam masyarakat (Rasyid, 1997 : 48).

Berdasarkan pendapat diatas Pembangunan adalah salah satu tugas pokok dalam Pemerintahan. Maka dari itu Pembangunan adalah suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk menciptakan keadilan dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat termasuk tingkat kecamatan. Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah. Perubahan tersebut dilakukan secara kontinuitas menuju kearah yang lebih baik.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan manajemen pemerintah yang baik, tetapi juga sangat bergantung kepada tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat ditentukan oleh beberapa hal antara lain kondisi sosial budaya yang meliputi tingkat pendidikan, agama, dan komposisi umur, serta tingkat pendapatan. Disamping itu, ekonomi juga memerankan peranan yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai kewajiban meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Disini juga masyarakat disamping sebagai objek juga merupakan subjek pembangunan, dimana masyarakat sendiri diharapkan dapat bergerak atau berperan sebagai penggeraknya. Karena realita menunjukkan bahwa setiap pembangunan yang akan dilaksanakan akan berhasil dan tepat sasaran apabila masyarakat diikut sertakan atau dilibatkan dalam pembangunan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Sastroepoetro dalam Sudiamunawar, (2006 : 47) yaitu :

“ Peran serta masyarakat dalam pembangunan mempunyai peran yang sangat penting, hal ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa masyarakat dapat berperan bukan saja sebagai objek tetapi juga berperan sebagai subjek. Subjek peran serta hendaklah berkaitan dengan organisasi dimana individu yang bersangkutan itu tergabung sesuatu yang menjadi perhatiannya”.

Dengan demikian jelaslah partisipasi masyarakat secara operasional dapat berperan dalam perencanaan pembangunan, dalam pelaksanaan dan memanfaatkan hasil pembangunan serta berperan dalam menilai pembangunan hubungannya dengan kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar.

Dari pengertian diatas jelaslah ini bahwa kerjasama antara masyarakat dan pihak pemerintah dalam hal ini kecamatan harus dapat menciptakan suatu kondisi pembangunan yang dinamis sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara bersama.

Fokus penelitian ini hanya sebatas penelitian pada pembangunan fisik di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pelaksanaan pembangunan fisik di Kecamatan merbau kabupaten kepulauan meranti merupakan pembangunan yang dapat berupa pelaksanaan pembangunan berupa infrastruktur yang dapat mendukung aktifitas masyarakat kecamatan merbau yang dapat berupa pembangunan mushallaatau masjid, parit beton, pembangunan MDA dan sernenisasi jalan

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan di lapangan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan fisik di Kecamatan Merbau, yang dilaksanakan pada tahun 2010 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1. Jenis Pembangunan Fisik dan Partisipasi Masyarakat Berupa Tenaga Di Kecamatan Merbau Tahun 2010

No	Jenis Pembangunan	Partisipasi Masyarakat		Persentase
		Target	Realisasi	
1.	Semenisasi Jalan	100 orang	50 orang	50%
2.	Parit Beton	32 orang	15 orang	47%
3.	MDA	80 orang	35 orang	44%
4.	Mushalla	50 orang	50 orang	100%
Jumlah		262 orang	150 orang	57%

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Merbau Tahun 2010

Dari tabel diatas dapat di lihat tingkat partisipasi masyarakat berupa tenaga dari jenis pembangunan semenisasi jalan ditargetkan 100 orang tetapi yang terealisasi hanya 50 oarang atau sekitar 50%, kemudian pada pembangunan parit beton ditargetkan 32 orang namun terealisasi hanya 15 orang dalam persen sekitar 47%, pembangunan MDA 50 orang yang menjadi target kenyataan di lapangan hanya 35 orang, terakhir dalam pembangunan Mushalla di Kecamatan Merbau adalah paling tinggi tingkat partisipasinya yakni target semula yang hanya 50 orang yang ada di lapangan sesuai dengan target yang ditargetkan atau 100%.

Tabel 1.2. Jenis Pembangunan Fisik dan Partisipasi Masyarakat berupa Keahlian di Kecamatan Merbau Tahun 2010

No	Jenis Pembangunan	Partisipasi Masyarakat		Persentase
		Target	Realisasi	
1.	Semenisasi Jalan	12 orang	6 orang	50%
2.	Parit Beton	15 orang	5 orang	33%
3.	MDA	20 orang	12 orang	60%
4.	Mushalla	20 orang	15 orang	75%
Jumlah		67 orang	38 orang	57%

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Merbau Tahun 2010

Dari Tabel di atas dapat dilihat tingkat partisipasi berupa keahlian secara keseluruhan melebihi dari 50% yakni dari pembangunan semenisasi jalan yang menjadi target adalah sekitar 12 orang tetapi yang terealisasi hanya 6 orang atau sekitar 50 %, tetapi dari pembangunan parit beton yang paling rendah tingkat partisipasinya yakni target 15 orang tetapi yang terealisasi hanya 5 orang atau sekitar 33%, pembangunan MDA yang ditargetkan 20 orang tetapi yang hadir melebihi dari 50% yakni sekitar 12 orang dan yang tertinggi tingkat partisipasinya adalah pembangunan Mushalla yakni yang menjadi target 20 orang dan terealisasi sekitar 75% atau sekitar 15 orang.

Tabel 1.3. Jenis Pembangunan Fisik dan Partisipasi Masyarakat berupa Dana Kecamatan Merbau Tahun 2010

No	Jenis Pembangunan	Partisipasi Masyarakat		Persen
		Target	Realisasi	
1.	Semenisasi jalan	15.000.000,-	7.000.000,-	46,66%
2.	Parit Beton	20.000.000,-	5.000.000,-	25%
3.	MDA	25.000.000,-	10.000.000,-	40%
4.	Mushalla	20.000.000,-	15.000.000,-	75%
Jumlah		60.000.000,-	32.000.000,-	53,33%

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Merbau Tahun 2010

Tingkat partisipasi masyarakat berupa dana secara keseluruhan melebihi 50%. Dimana dari segi semenisasi jalan target dana dari masyarakat Rp.15.000.000,-, dan hanya terealisasi Rp. 7.000.000,-. Dari segi pembangunan parit beton tahun 2009 masyarakat hanya mengumpulkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- sementara pihak kecamatan menargetkan dana partisipasi masyarakat sebesar 20.000.000,- hal ini yang menentukan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan MDA Pemerintah Kecamatan hanya

menargetkan anggaran dana dari masyarakat sebesar Rp. 25.000.000,- tetapi hanya terealisasi sebesar Rp.10.000.000,- dan pembangunan Mushalla target yang dianggarkan Pemerintahan Kecamatan sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp.15.000.000,- atau sekitar 75%, pada pembangunan Musolla tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi, mengingat penduduk di Kecamatan Merbau mayoritas adalah Muslim dan masyarakat menganggap mengerjakan dalam hal ini perbaikan mushalla merupakan amal sebagai seorang muslim.

Berdasarkan gejala-gejala tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul. **“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat penulis rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut : **Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti?**

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Merbau.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Merbau.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bentuk sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak yang terkait dan agar dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Merbau dapat berjalan dengan baik dan efektif.
2. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintahan Kecamatan Merbau dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Dapat menambahkan pengetahuan peneliti tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Merbau.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab I ini pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TELAAH PUSTAKA

Dalam Bab II ini berisikan telaah pustaka yang merupakan landasan teori yang menyangkut referensi-referensi dan buku-buku permasalahan yang akan di bahas oleh penulis.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab III metode yang berisikan tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data serta analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM

Dalam bab IV ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitian gambaran

umum ini membahas dan merincikan keadaan umum partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Merbau yang akan di bahas.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas dari hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Merbau.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian serta saran yang bersifat membangun bagi objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan berasal dari kata “bangun” yang berarti sadar, siaman, bangkit, berdiri, dan juga berarti juga bentuk. Dalam kata kerja bangun juga berarti membuat, mendirikan atau membina. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan meliputi bentuk (anatomis), kehidupan (fisiologis), dan perilaku (*behavioral*). Pembangunan menurut P.Siagian, (2005 : 4-5) adalah suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang terencana dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, dan negara. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pembangunan itu merupakan suatu proses kegiatan.
- b. Pembangunan itu merupakan usaha yang sadar dilakukan oleh masyarakat.
- c. Pembangunan itu mengarah kepada perbuatan yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat.
- d. Pembangunan pada prinsipnya lebih menuju kearah yang lebih baik.

Pembangunan itu sendiri bukanlah merupakan suatu proses yang berjalan tanpa upaya yang didasari dan disengaja. Hal ini berimplikasi bahwa usaha manusia sangat mempengaruhi proses pembangunan itu sendiri, tanpa adanya usaha, maka jelaslah suatu pembangunan itu tidak terapai.

Bagi Bangsa Indonesia, sudah jelas landasan arah, serta cita-cita pembangunan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk pembangunan dapat diputuskan dengan cara apa untuk mengubah keadaan sesuatu menjadi keadaan yang lain seperti apa yang dicita-citakan. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa setiap pembaharuan yang tidak saja meliputi hal-hal yang bersifat lahiriah, tetapi juga permasalahan yang bersifat batiniah.

Pembangunan daerah adalah semua kegiatan pembangunan baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk urusan rumah tangga daerah yang meliputi berbagai sumber pembiayaan, baik yang berasal dari Pemerintah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan yang bersumber dari masyarakat (Kunarjo, 1997 : 156).

Menurut Surjono, (2008: 2) menyebutkan bahwa pembangunan adalah upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dan memiliki lima implikasi utama yaitu :

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu, maupun kelompok.

2. Pembangunan berarti mendorong tubuhnya kebersamaan, pemerataan nilai, dan kesejahteraan.
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai kemampuannya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan.
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri.
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu kepada negara. Menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan menghormati.

Dari uraian diatas bahwa pembangunan itu sangat penting, karena dengan adanya pembangunan akan memudahkan pertumbuhan bagi negara Republik Indonesia baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik.

Pembangunan fisik yang dilaksanakan dapat berupa pembangunan semenisasi jalan, gedung-gedung, rumah ibadah, serta pembangunan infrastruktur-infrastruktur lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan suatu daerah baik ekonomi maupun perkembangan masyarakat di daerah.

Maka menurut Sudriamunawar, (2006: 88) pembangunan dapat pula didefinisikan sebagai suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu. Disini pemerintah juga dituntut untuk bisa menampung aspirasi masyarakat yang semakin berkuantitas dan berkualitas serta mengarahkan potensi yang ada pada masyarakat tersebut. Karena

tanpa adanya bimbingan dan arahan dari pemerintah daerah maka potensi yang tengah-tengah masyarakat akan menjadi sia-sia belaka.

Sementara Menurut Roger dalam Zulkarimen Nasution, (2002: 82) pembangunan merupakan sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial, sedangkan pada modernisasi menunjuk pada proses yang terjadi pada level individu.

Dari uraian diatas bahwa pembangunan itu akan terjadi apabila masyarakat ikut berpartisipasi serta pembangunan itu hanya bisa terjadi masyarakat atau kalangan tertentu saja. Pembangunan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran perbaikan kondisi masyarakat, sebagian besar memang semata-mata bersifat pembangunan sarana dan prasarana fisik, dimana dalam melaksanakan pembangunan secara umum sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan fisik tersebut meliputi pembangunan prasarana-prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat (Soewingyo, 1986 : 91).

Partisipasi masyarakat secara operasional dapat berperan dalam perencanaan pembangunan, dalam pelaksanaan, dan memanfaatkan hasil pembangunan, serta berperan dalam menilai pembangunan hubungannya dengan kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar.

Pembangunan pada dasarnya harus dilaksanakan secara terarah, dinamis, dan berkelanjutan dalam arti bahwa pembangunan akan terus dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi, serta kemampuan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, terutama yang menyangkut potensi masyarakat dan daya dukung alamnya cepat atau lambatnya pembangunan di daerah adalah

pencerminan dari kegiatan, kelincahan, daya inisiatif dan keterampilan pemerintah daerah tingkat kecamatan.

Pandangan islam terhadap pembangunan terdapat dalam dalam Surat Adh Dhuha ayat 4 :

وَلَا آخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى

Artinya : Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan).

Maksud ayat tersebut adalah bahwa akhir perjuangan Nabi Muhammad S.A.W itu akan menjumpai kemenangan-kemenangan, sedang permulaan dengan kesulitan-kesulitan, adapula sebagian tafsir yang mengartikan akhirat dengan kehidupan akhirat beserta segala kesenangan dan dengan arti kehidupan dunia.

2.2. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan, baik dalam bentuk uang (benda), pikiran (ide), maupun dalam bentuk tenaga (gotong-royong). Selamat, (1990 : 26) mengemukakan bahwa partisipasi adalah peran serta dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam menyusun program pembangunan ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan ikut sertanya memanfaatkan hasil pembangunan yang nyata.

Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam bentuk menyumbang uang, pikiran dan tenaga meyakini bahwa dalam pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan dari setiap pembangunan. Tampaknya pemerintah telah

meyakini bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu persyaratan pertama untuk keberhasilan dalam proses pembangunan tersebut. Dapat dilihat adanya kemauan dari pemerintah dalam pelaksanaan proses pembangunan ini tetapi kenyataannya dilapangan masih cukup banyak terdapat hambatan.

Partisipasi menurut Surbakti, (1999: 140), yaitu keikutsertaan warga negara atau masyarakat biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik dalam negara demokrasi sangatlah penting, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, maka tidak akan berjalan dengan baik suatu pemerintahan.

Dari rumusan diatas dapat kita lihat bahwa partisipasi itu sangat perlu dalam kehidupan bermasyarakat karena masyarakat merupakan suatu proses kegiatan yang akan dicapai.

Partisipasi menurut Bhattac Harya, didefinisikan sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama, Partisipasi sebagai masukan pembangunan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa yang bersangkutan.

Partisipasi adalah sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Dari pendapat diatas jelas pembangunan dapat berhasil, maka diperlukan dukungan masyarakat, perhatian, serta partisipasi masyarakat dalam segala bidang (Mubiyarto, 1994: 35).

Arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan seperti yang dikatakan oleh Peter dalam Ndraha, (1997: 80) adalah jika masyarakat yang bersangkutan tidak berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan suatu proyek, maka kegiatan pembangunan kurang berjalan dengan baik.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, terutama dalam pembentukan dana masyarakat secara gotong royong. Hal ini sangat diperlukan mengingat pembangunan tidak harus selalu dibiayai oleh pemerintah tetapi harus pula dilandaskan pada kesadaran masyarakat bersangkutan untuk menyediakan dana-dana yang diperlukan bagi membiayai sekaligus menunjang kegiatan pembangunan tersebut dan yang terpenting adalah partisipasi masyarakat dapat menunjang pembangunan yang lebih baik dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat itu sendiri.

Menurut Kutoyo dalam Tjokroamidjojo, (2006: 48) partisipasi masyarakat yaitu pengertian mental serta emosi seseorang dalam situasi kelompok dan mendorong mereka untuk mencapai tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggungjawab pada organisasi tersebut. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan dan menunjukkan prioritas.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, terutama dalam pembentukan dana masyarakat secara gotong-royong. Hal ini sangat diperlukan mengingat pembangunan tidak harus selalu dibiayai oleh pemerintah, tetapi harus pula dilandaskan pada kesadaran masyarakat

bersangkutan untuk menyediakan dana-dana yang diperlukan bagi membiayai sekaligus menunjang kegiatan pembangunan tersebut (Saparin, 1997: 44).

Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat berdasarkan rumusan Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa(PMD) Depdagri dalam Sudriamunawar, (2006: 47) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dengan sadar dalam suatu program atau kegiatan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Dengan demikian, peran serta masyarakat dapat ditumbuh kembangkan dengan berbagai upaya. Dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat dapat di golongankan sebagai berikut :

1. Partisipasi Berupa Dana

Yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk sumbangan baik berupa barang (harta) atau uang. Hal ini biasanya dilakukan seseorang bila dia tak mampu untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan tersebut.

Partisipasi harta dapat berupa sumbangan pembebasan tanah, perbaikan kondisi jalan, sumbangan, dan sumbangan untuk ronda malam untuk keperluan pembangunan yang dibutuhkan, serta alat-alat kerja yang menunjang dalam proses pembangunan yang terlaksana. Sedangkan untuk partisipasi berupa uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan dalam bentuk uang. Kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi ditunjukkan sejauh mana mereka memberi kontribusi kepada pihak pemerintah seperti barang, uang, atau jasa. Barang adalah sesuatu yang

berwujud benda yang bermanfaat bagi pembangunan. Pembangunan dengan Kontruksi kayu akan menggunakan seluruh peralatan kayu. Begitu juga seterusnya, artinya jika masyarakat ingin menyumbangkan barang untuk pembangunan berarti harus menyesuaikan dengan kontruksi bangunan yang akan dibuat. Asumsi ini menekankan bahwa terlibatnya masyarakat menyumbangkan sesuatu dalam bentuk material merupakan wujud dari partisipasi. Uang sebagai barang berharga merupakan sebagai alat tukar yang sah untuk transaksi di dunia dagang. Uang yang didapatkan harus dengan usaha yang maksimal agar hasil yang diperoleh didapat memenuhi kebutuhan. Dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara bersama, masyarakat diharapkan dapat menyumbangkan sejumlah hasil pendapatannya terutama untuk pembangunan daerah.

Sedangkan partisipasi dana yang ditunjukkan oleh pemerintah adalah memberikan penjelasan terhadap masyarakat biaya anggaran yang harus dipenuhi oleh masyarakat karena penjelasan ini merupakan bentuk kerjasama pihak pemerintah terhadap masyarakat atau bentuk transparansi pemerintah atas anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Keterlibatan masyarakat dalam menyumbangkan uang pada proses pembangunan dapat dijadikan tolak ukur sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

2. Partisipasi Berupa Tenaga (Fisik)

Yaitu partisipasi bersifat aktif yang dilakukan seseorang atau masyarakat dengan terjun langsung dalam kegiatan pembangunan. Dalam kehidupan masyarakat perkembangan berupa tenaga ini tampak pada pekerjaan gotong-royong, dan tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program seperti bakti sosial, maupun keikutsertaan ronda malam.

Dalam partisipasi tenaga ini pemerintah selaku memegang kekuasaan daerah wajib melakukan pengawasan terhadap tenaga-tenaga yang di butuhkan selama pelaksanaan proses pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan kepentingan untuk daerah yang akan melakukan pelaksanaan pembangunan.

3. Partisipasi Berupa Keahlian (Keterampilan)

Yaitu partisipasi yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat dalam bentuk kemahiran yang dimilikinya untuk keperluan pembangunan tersebut. Misalnya partisipasi berupa ide, fikiran konstruktif baik untuk menyusun program maupun pelaksanaan program baik pemberian pengalaman, pengetahuan yang dimiliki serta memberi dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan seperti paguyuban dan arisan.

Partisipasi dalam konteks ini mencakup keikutsertaan atau keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, dan dalam penerapan program, yaitu adanya pembagian keuntungan atau manfaat dari hasil

pelaksanaan kegiatan, serta keterlibatan warga dalam mengevaluasi kegiatan tersebut. Konsep partisipasi dimaksud menggambarkan tahapan partisipasi dalam proses pembangunan.

Selain itu, partisipasi keterampilan ini juga memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Partisipasi berupa keahlian ini merupakan bentuk partisipasi yang sangat menunjukkan kualitas suatu masyarakat yang melakukan pelaksanaan pembangunan, karena semakin banyak masyarakat berpartisipasi berupa keahlian, maka semakin mengarahkan kepada kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan di suatu daerah.

Pemerintah orientasi penyelenggaraan pembangunan pihak pemerintah perlu memberdayakan masyarakat agar dapat mendorong tercapainya tujuan pembangunan. Memberdayakan masyarakat bukanlah hal yang mudah karena perlu memahami karakteristik masyarakat, butuh waktu yang lama, sistem yang tepat, prosedur sosialisasi pendidikan, dan pelatihan. Pendekatan yang tepat pada masyarakat akan membuahkan hasil yang baik bila muncul respon yang tinggi pada masyarakat terhadap segala tujuan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita pembangunan.

Berdasarkan jenis sumbangannya, Menurut Machmur dalam Kuncoro, (2004: 25) ada beberapa jenis partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi Berupa Ide

Partisipasi berupa ide adalah partisipasi berupa sumbangan berupa pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

2. Partisipasi Berupa Tenaga

Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.

3. Partisipasi Berupa Benda (Biaya)

Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.

4. Partisipasi Berupa Keterampilan dan Partisipasi Sosial

Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Partisipasi sosial, Partisipasi jenis ini diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya, arisan, menghadiri kematian, dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.

Pada hakikatnya partisipasi itu adalah merupakan suatu keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat dalam setiap pelaksanaan sebuah kebijakan, partisipasi masyarakat tersebut perlu di dorong dengan beraneka ragam pendekatan. Secara umum jenis partisipasi yang ada dan tumbuh didalam masyarakat dapat kita lihat seperti:

1. Partisipasi dengan pikiran,
2. Partisipasi Tenaga,
3. Partisipasi dengan Keahlian,
4. Partisipasi dengan Uang,
5. Partisipasi dengan Jasa-jasa (Sastropoetra, 1998: 43).

Menurut Ndraha, (1987: 14) ada beberapa wadah bagi terwujudnya partisipasi masyarakat, wadah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Wadah Partisipasi Buah Pikiran (Diberikan Dalam Rapat)

Rapat yang dimaksud seperti dalam rapat, seminar, penataran-penataran.

2. Wadah Partisipasi Tenaga

Yang diberikan dalam perbaikan pembangunan agar partisipasi tenaga merupakan pendorong, perlu di usahakan penertiban, penjelasan-penjelasan tentang manfaat. Dari partisipasi ini banyak hal yang didapat antara lain bangkitnya rasa berlomba, rasa tanggung jawab.

3. Wadah Partisipasi Benda

Dikalangan masyarakat masih hidup kesediaan memberikan harta benda terhadap usaha yang dirasakan meringankan beban hidup mereka seperti perbaikan kondisi jalan, sumbangan, ronda malam.

4. Wadah Partisipasi Keterampilan

Di desa memiliki keterampilan seperti keterampilan prestasi dalam bidang olah raga terutama bola volly dan sepak bola.

Dilihat dari pengamatan diatas bahwa partisipasi itu dilakukan melalui upaya perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa, dan masyarakat desa diberikan kesempatan memilih dan memutuskan apa yang diinginkannya dan yang dikehendakinya.

Dawam Raharjo mengutip pendapat Tjokoroamidjojo, (1987: 94)mengatakanbahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan meliputi beberapa hal antara lain :

1. Keterlibatan dalam penentuan arah strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Keterlibatan memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan.

Islam berpandangan terhadap partisipasi denganselalu berbuat baik dan adil terhadap sesama manusia dengan menyamakan perbedaan pendapat.

Surat al-mumtahanah ayat 8 :

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusirmu dari negerimu. sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

2.3. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu hipotesis sebagai berikut : Diduga partisipasi masyarakat yang terdiri dari partisipasi berupa tenaga, partisipasi berupa keahlian, dan partisipasi berupa dana di Kecamatan Merbau dalam pembangunan masih rendah.

2.4. Konsep Operasional

Untuk memudahkan memahami, serta menyamakan persepsi terhadap konsep-konsep yang digunakan perlu dijelaskan dan dijabarkan konsep operasional sebagai berikut:

1. Pembangunan kecamatan adalah proses pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kecamatan bersama dengan masyarakat dalam suatu kecamatan.
2. Pembangunan adalah pembangunan yang dilaksanakan di kecamatan dengan menggunakan dana bantuan pembangunan.
3. Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah keikutsertaan masyarakat Kecamatan Merbau pada setiap tahap pembangunan, mulai dari merencanakan, melaksanakan, hingga menikmati dan memelihara hasil pembangunan di Kecamatan Merbau.

4. Partisipasi dalam pembangunan adalah keikutsertaan dalam :
 - a. Memberikan bantuan tenaga untuk pelaksanaan pembangunan, yaitu ikut sertanya masyarakat dalam gotong royong melaksanakan pembangunan.
 - b. Memberikan bantuan berupa uang atau benda untuk melaksanakan pembangunan, yaitu kemampuan masyarakat dalam memberikan bantuan uang atau benda untuk menambah dana bantuan pembangunan.
 - c. Memberikan keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat dalam berbagai bidang yang menunjang proses pembangunan.

2.5. Teknik Pengukuran Data

Untuk menganalisa penelitian ini, maka penulis menggunakan pengukuran dengan skala likert. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka yang akan diukur di jabarkan menjadi indikator variabel (sugiyono, 2006 : 107).

Setiap responden diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada pada kuisioner, dimana masing-masing jawaban diberi skor sebagai berikut :

Untuk indikator partisipasi masyarakat.

- Sering = 3
- Kadang-kadang = 2
- Tidak pernah = 1

Dalam pelaksanaan pembangunan sub indikator partisipasi masyarakat berupa dana, tenaga, dan partisipasi berupa keahlian atau keterampilan, yaitu :

1. Untuk variabel partisipasi masyarakat berupa dana
 - Berpartisipasi berupa dana,
 - Berpartisipasi dalam bentuk tanah, dan
 - Berpartisipasi berupa barang keperluan pembangunan.
2. Untuk variabel partisipasi berupa tenaga
 - Masyarakat berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan,
 - Berperan aktif dalam setiap kegiatan pembangunan, dan
 - Bergotong royong dalam memperbaiki sarana umum.
3. Untuk variabel partisipasi masyarakat keterampilan atau keahlian
 - Masyarakat yang berpotensi dalam pembangunan dapat menjadi tenaga ahli dalam kegiatan tersebut,
 - Memberikan masukan atau ide yang berguna bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan
 - Dapat berperan serta dalam mengisi pembangunan dengan kemampuan yang dimiliki.

2.6. Variabel Penelitian

Adapun Variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Partisipasi berupa dana.
2. Partisipasi berupa tenaga.
3. Partisipasi berupa keahlian.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Merbau yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2010.

3.2. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Metodologi penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif, artinya penulis tidak akan melakukan terlalu banyak memberikan penilaian terhadap data yang ada, akan tetapi akan lebih memprioritaskan kepada penggambaran situasi atau secara umum yaitu dengan nama Deskriptis Analisis.

Data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden berupa informasi mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Merbau.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatan mengenai keadaan lokasi penelitian berupa :
 - Gambaran Umum Mengenai Kecamatan Merbau
 - Tugas Dan Fungsi Camat
 - Struktur Organisasi Kecamatan

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Menurut Sugiono, (2005: 90) mendefenisikan bahwa populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang tetap oleh peneliti untuk dipelajari oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
- c. Kepala Seksi
- d. Lurah/Kepala Desa
- e. RW
- f. RT
- g. Masyarakat

3.3.2. Sampel

Menurut Sugiono, (2005: 92) sampel adalah sebagian jumlah dari karekteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Oleh karena itu penulis mengambil sampel yang dianggap dapat mewakili dari keseluruhan populasi.

Dalam penelitian ini untuk penarikan sampel peneliti meggunakan Rumus Slovin., Husain, (2004: 107). Dari 5300 populasi diperoleh sampel 100 responden. Untuk tingkat aparatur pemerintah yaitu camat berjumlah 1 orang, sekretaris camat 1 orang, kepala seksi 4 orang, dan lurah/kades1 orang masing-masing

sampel untuk aparaturn pemerintah diambil dengan *metode sensus*, yaitu semua populasi dijadikan sebagai sampel. Sedangkan untuk RW 7 sampel dari 13 populasi dan RT 10 sampel dari 20 populasi sedangkan masyarakat yang diambil menjadi sampel 76 orang dari 5260 populasi masyarakat, penentuan sampel untuk RW, RT, dan masyarakat dengan menggunakan sistem acak sederhana.

Tabel 3.1.Keadaan Populasi Dan Sampel Penelitian Kecamatan Merbau

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Camat	1	1	100%
2.	Sekretaris Camat	1	1	100%
3.	Kepala Seksi	4	4	100%
4.	Lurah/Kepala Desa	1	1	100%
5.	RW	13	7	53%
6.	RT	20	10	50%
7.	Masyarakat	5.260	76	0,12%
Jumlah		5.300	100	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2010

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n= Ukuran sampel

N= Ukuran populasi

e = Taraf kesalahan dalam penentuan sampel

$$n = \frac{5300}{1 + 5300(0,1)^2}$$

$$n = \frac{5300}{1 + 5300(0.01)}$$

$$n = \frac{5300}{1 + 53}$$

$$n = \frac{5300}{54}$$

$$n = 98,14$$

Karena sampel dalam populasi tidak bisa menggunakan bilangan desimal maka dibulatkan menjadi 100 sampel.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview, yaitu penulis melakukan tanya jawab atau wawancara langsung dengan responden yang terkait dalam penelitian ini.
- b. Observasi, melihat dan mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi dan mencatat hal-hal yang diperlukan berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Kuisioner atau Angket, yaitu dengan membuat dan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden, guna memperoleh data yang diperlukan pada penelitian.

3.5. Analisa Data

Setelah data dan bahan yang menunjang penelitian ini terkumpul dan penulis kelompokkan sesuai dengan jenis data tersebut. Selanjutnya penulis akan analisa dengan menggunakan Metode Teknis Analisis Deskriptif, yaitu suatu analisa dalam memberikan gambaran berdasarkan kenyataan yang diperoleh di lapangan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1. Geografi Kecamatan Merbau

4.1.1. Luas dan Batas Wilayah

Kecamatan Merbau merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan luas kecamatan 1.348,91 km².

Adapun batas-batas Wilayah Kecamatan Merbau dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Tebing Tinggi Barat
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Rangsang Barat

4.1.2. Jarak Kecamatan

1. Jarak kecamatan Ke Kabupaten = 51 km
2. Jarak kecamatan Ke Provinsi = 250 km

4.1.3. Keadaan Iklim

Iklim di Kecamatan Merbau pada umumnya beriklim tropis, dan dikenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berjalan lebih kurang 5 (lima) bulan yaitu bulan April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus, sedangkan bulan lainnya merupakan musim penghujan, Kecamatan Merbau

terletak pada ketinggian lebih kurang 2 meter dari permukaan laut. (Monografi Kecamatan Merbau tahun 2010).

4.1.4. Keadaan Penduduk

Berdasarkan angka lahir Tahun 2010 jumlah Penduduk Kecamatan Merbau adalah 52.822 jiwa. Di Kecamatan Merbau penduduk yang mendiami daerah ini masih bersifat heterogen dimana masyarakat masih menggunakan adat-adat suku. Karena daerahnya sangat luas..

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1: Klasifikasi Jumlah Penduduk di Kecamatan Merbau Menurut Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	Jumlah
1.	0-6 Tahun	6.654
2.	7-12 Tahun	6.654
3.	13- 18 Tahun	6.853
4.	19-24 Tahun	8.750
5.	25-55 Tahun	20.856
6.	56-79 Tahun	2.933
Jumlah:		52882

Sumber : Kantor camat kecamatan merbau 2010

Dari Tabel 4.1. diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Kecamatan Merbau pada usia 25-55 Tahun yang merupakan usia produktif bagi manusia untuk melakukan berbagai aktifitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya:

Dari tabel diatas dapat dijelaskan keadaan penduduk Kecamatan Merbau berdasarkan mata pencaharian, sebesar 24.832 orang jumlah penduduk yang merupakan petani, 5956 orang penduduk dengan mata pencaharian nelayan, 1457 orang sebagai peternak, 259 orang sebagai pegawai swasta, pegawai negeri sipil berjumlah 756 orang, anggota TNI berjumlah 9 orang, pedagang dengan jumlah 324 orang, anggota POLRI berjumlah 15 orang, untuk yang tidak bekerja termasuk yang belum sekolah dan orang tua usia lanjut berjumlah 19234 orang.

4.1.7. Keadaan Pendidikan

Tabel 4.4. Keadaan Pendidikan di Kecamatan Merbau

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Belum Sekolah	14.956	28,29
2.	Tidak Sekolah	286	0,54
3.	Tidak Tamat SD	374	0,70
4.	Tamat SD	18.251	34,51
5.	Tamat SLTP	9.616	18,18
6.	Tamat SLTA	7.811	14,77
7.	Tamat Akademi	1.198	2,26
8.	Perguruan Tinggi	390	0,73
	Jumlah	52882	100

Sumber : Kantor Camat Merbau 2010

Dari tabel diatas dapat dijelaskan tentang keadaan pendidikan yang terdapat di Kecamatan Merbau yakni jumlah penduduk yang belum sekolah sebesar 14.956 orang (28,29%), yang tidak sekolah sebesar 286 orang (0,54%), tidak tamat SD sebesar 374 orang (0,70%), yang tamat SD sebesar 18.251 orang (34,51%), yang tamat SLTP sebesar 9.616 orang (18,18%), tamat SLTA sebesar 7.811 orang (14,77%), tamat akademi sebesar 1.98 orang (22,6%), perguruan tinggi sebesar 390 (0,73).

4.2. Pemerintahan Kecamatan Merbau

4.2.1. Sejarah Kecamatan

Sebelum Indonesia merdeka Kecamatan Merbau berada dalam lingkungan Pemerintahan Kerajaan siak yang berdiri sampai dengan tahun 1942. Kecamatan Merbau pada masa itu disebut Distrik Merbau dengan ibu negerinya Teluk Belitung dibawah onder distrik tebing tinggi, pada permulaan Kemerdekaan Republik Indonesia distrik Merbau menjadi Kecamatan Merbau dibawah Kewedanaan Selat Panjang.

Berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 1956 lahirlah Kabupaten Bengkalis yang berada dalam Provinsi Wilayah Sumatera Tengah dan setelah Sumatera Tengah dipecah menjadi 3 (tiga) Propinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi dan Riau maka lahir pula lah Provinsi Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 dan masuklah Kabupaten Bengkalis kedalam Propinsi Riau, sejak lahirnya Kabupaten Bengkalis maka Kecamatan Merbau lepas dari kewedanaan Selat Panjang langsung dibawah Kabupaten Bengkalis. Dan berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Merbau lepas dari Kabupaten Bengkalis maka masuk dalam Kabupaten Kepulauan Meranti (Monografi Kecamatan Merbau tahun 2010).

4.2.2. Uraian:Tugas

a. Tugas Camat

1. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

b. Kewenangan Camat

1. Camat melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :
 - a. Perizinan
 - b. Rekomendasi
 - c. Koordinasi
 - d. Pembinaan
 - e. Pengawasan
 - f. Fasilitasi
 - g. Penetapan
 - h. Penyelenggaraan

2. Pelaksanaan kewenangan Camat mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

c. Sekretaris Kecamatan

Fungsi sekretaris kecamatan yaitu melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh kesatuan organisasi pemerintahan kecamatan.

Adapun tugas Sekretaris Camat yaitu :

- Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya.
- Mempersiapkan dan melaksanakan urusan administrasi keuangan.
- Mempersiapkan dan melaksanakan urusan Tata Usaha, Administrasi Kepegawaian, Perlengkapan dan rumah tangga.
- Membantu Camat mempersiapkan dan melaksanakan urusan administrasi pertanahan.

d. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan dikepalai oleh kepala seksi pemerintahan yang mempunyai fungsi yaitu merumuskan dan melaksanakan tugas

pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan kelurahan, administrasi kependudukan dan pembinaan politik dalam negeri.

Adapun tugas seksi pemerintahan yaitu :

- Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan umum dan kelurahan.
- Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa.

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi ketentraman dan ketertiban dikepalai oleh kepala seksi ketentraman dan ketertiban yang mempunyai fungsi dari yaitu merumuskan dan melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi pamong praja. Adapun tugas seksi ketentraman dan ketertiban yaitu :

- Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan program pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja.

f. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan

Seksi pembangunan masyarakat Desa/kelurahan dikepalai oleh kepala Seksi pembangunan masyarakat Desa/kelurahan dan dalam

pelaksanaan tugasnya dibantu oleh staf-stafnya. Fungsi seksi Pembangunan Masyarakat/Kelurahan yaitu merumuskan dan melaksanakan perencanaan dan penyusunan pembinaan pembangunan dibidang perekonomian Desa/Kelurahan, produksi dan distribusi.

Adapun tugas seksi Pembangunan Masyarakat Desa/kelurahan yaitu :

- Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan program pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi.
- Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pembinaan lingkungan hidup.

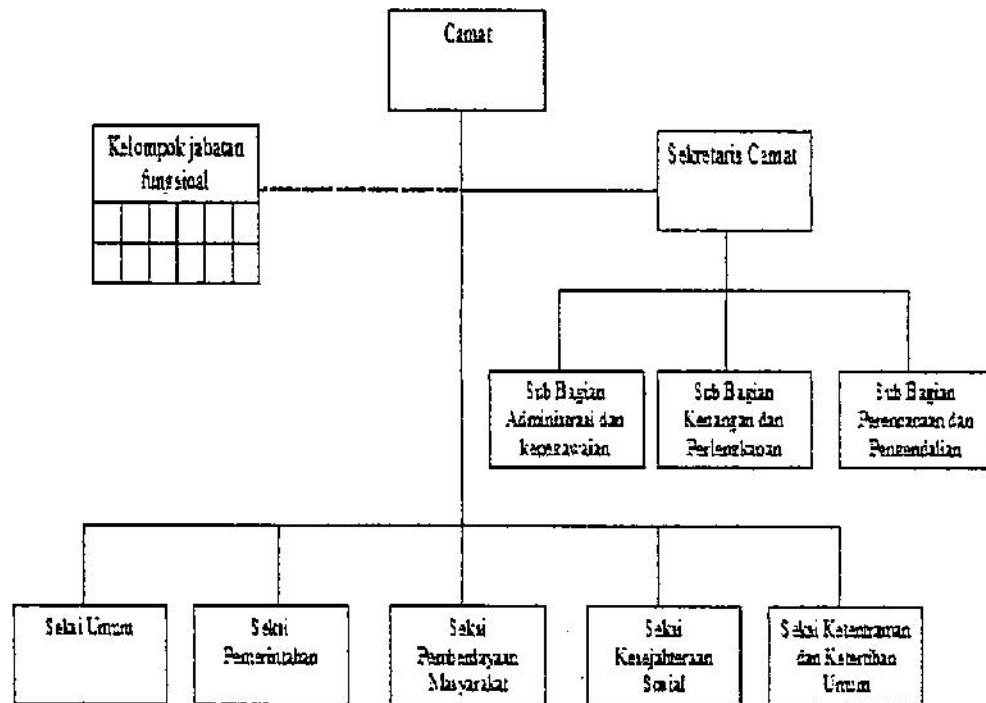
g. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi kesejahteraan sosial dikepalai oleh kepala seksi kesejahteraan sosial yang dalam pelaksanaan tugasnya di Bantu oleh staf-stafnya. Fungsi seksi kesejahteraan sosial yaitu merumuskan dan melaksanakan koordinasi penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

adapun tugas Seksi Kesejahteraan Sosial yaitu :

- Mempersiapkan dan melaksanakan tentang pembinaan pelayanan dan bantuan kesejahteraan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga.
- Mempersiapkan dan melaksanakan pembinaan kehidupan beragama
- Mempersiapkan dan melaksanakan pembinaan terhadap pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan masyarakat.

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN MERBAU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



Sumber: Kantor Camat Merbau Tahun 2010



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan di Kecamatan Merbau senantiasa tidak terlepas dari masyarakat itu sendiri tanpa adanya partisipasi masyarakat otomatis pembangunan tidak akan terlaksana, sebagai motivator dalam menyampaikan setiap program-program pembangunan kepada masyarakat baik perencanaan pelaksanaan pembangunan maupun komunikasi didalam memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan harus di ikut sertakan secara aktif pada pembangunan dan menikmati hasil pembangunan serta melestarikan proses pembangunan itu sendiri secara berkesinambungan. Oleh karena itu proses pembangunan secara alamiah harus muncul dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat. Sementara pihak pemerintah berperan sebagai pelancar dan pengendali pembangunan mekanisme demikian perlu dipahami bersama oleh segenap komponen pembangunan.

Pada umumnya tidak banyak masyarakat yang menunjukkan perhatian besar terhadap orientasi pembangunan berpartisipasi aktif demi kesempurnaan tujuan pembangunan. Di zaman serba tinggi tingkat pemenuhan kebutuhan hidup dan kurangnya peluang kerja untuk menghasilkan uang, masyarakat cenderung

melakukan partisipasi dengan pertimbangan imbalan berupa materi, meskipun pembangunan tersebut untuk mereka sendiri.

Sebelum penulis membahas partisipasi masyarakat sebagai motivator dan tingkat partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan pembangunan, dengan tingkat partisipasi masyarakat terlebih dahulu penulis membahas mengenai karakteristik responden dari beberapa segi yang dapat menunjang hasil analisa yaitu sebagai berikut:

Untuk mengetahui distribusi tingkat pendidikan responden didalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1. Ristribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	SD	21	21 %
2.	SLTP	29	29 %
3.	SLTA	21	21 %
4.	DIPLOMA	15	15 %
5.	Strata 1	12	12%
6.	Strata 2	2	2 %
Jumlah		100	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui tingkat pendidikan rata-rata masyarakat hanya tamat di bangku SLTP yaitu berjumlah 29 orang atau sekitar 29%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan masyarakat akan mempengaruhi pelaksanaan proses pembangunan.

Untuk mengetahui jumlah jenis kelamin responden di dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut ini :

Tabel 5.2 Ristribusi Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Nama Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	66	66 %
2.	Perempuan	34	34 %
	Jumlah	100	100 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2010

Dari tabel 5. 2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah jenis kelamin yang paling dominan adalah laki-laki yaitu 66 %, oleh karena itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tingkat jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, dengan demikian hal tersebut dengan banyaknya jumlah laki-laki otomatis lancarnya suatu proses pembangunan.

Selanjutnya mengenai distribusi usia responden didalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 5.3: Ristribusi Responden Menurut Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1.	25-29 Tahun	8	8 %
2.	30-34 Tahun	14	14 %
3.	35-39 Tahun	21	21 %
4.	40-44 Tahun	26	26 %
5.	45-49 Tahun	22	22 %
6.	50 tahun ke atas	9	9 %
	Jumlah	100	100 %

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan 2010

Dari tabel diatas dapat dapat diketahui bahwa distribusi umur responden masyarakat Kecamatan Merbau yang terbanyak pada umur 40-44 Tahun yaitu sebesar 26 %, dengan demikian di Kecamatan Merbau ini kurang potensi tenaga sebagai penggerak dalam pembangunan kurang begitu tersedia dengan baik.

5.2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

5.2.1. Partisipasi Berupa Tenaga

Dalam melakukan aktifitas pembangunan masyarakat dilibatkan secara langsung. Masyarakat tidak hanya sebagai subjek pembangunan tetapi sebagai objek. Disini masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan berupa tenaga yaitu dengan :

- Masyarakat langsung berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.
- Masyarakat dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan pembangunan.
- Masyarakat dapat bergotong-royong dalam memperbaiki sarana umum.
- Masyarakat ikut sebagai tenaga ahli dalam pelaksanaan pembangunan.
- Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.

Diharapkan dengan adanya partisipasi masyarakat dan dengan semangat gotong royong, maka pembangunan ini akan lebih dapat mempererat tali silaturahmi bagi sesama anggota masyarakat. Pemerintah sangat mengharapkan kerjasama yang baik dari masyarakat agar program pembangunan ini dapat terealisasi dan tepat sasaran.

Peran serta masyarakat dalam menyumbangkan tenaga dilihat sedang tidak seperti apa yang diharapkan. Sebagian besar tidak aktif langsung dalam kegiatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.4. Distribusi Jawaban Responden Tentang Partisipasi Langsung Dalam Kegiatan Pembangunan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1.	Sering	29	29%
2.	Kadang-kadang	50	50%
3.	Tidak pernah	21	21%
Jumlah		100	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2010

Menurut Bapak Imam Mukminin (salah satu responden. wawancara ; Mei: 2010) mengatakan keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi langsung tergantung jenis pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat, masyarakat sekitar beranggapan pelaksanaan pembangunan merupakan kewajiban pemerintah untuk membangun setiap daerah (Sumber: Penelitian Mei 2010).

Hal ini didukung juga oleh tabel diatas mengenai tanggapan responden tentang tingkat partisipasi langsung masyarakat dalam kegiatan pembangunan, dimana hanya terlihat 29 orang (29%) yang mengatakan sering, sementara 50 orang (50%) yang mengatakan kadang-kadang dan 21 orang (21%) yang mengatakan tidak pernah.

Tabel 5.5. Distribusi Jawaban Responden Tentang Peran Aktif Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1.	Sering	15	15%
2.	Kadang-kadang	57	57%
3.	Tidak pernah	28	28%
Jumlah		100	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2010

Menurut bapak Sihono (wawancara, Mei 2010) mengatakan bahwa respon masyarakat terhadap upaya pembangunan tidak memungkinkan dimana masyarakat kurang peduli dalam menggerakkan pembangunan karena sangat tergantung pada pemerintah daerah saja.

Keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan merupakan bentuk dari partisipasi aktif baik dari segi perencanaan konstruksi pembangunan maupun kaitannya dengan perencanaan dana. Sesuatu perubahan yang baik tidak semuanya akan dihasilkan oleh sekelompok orang melainkan harus ada keterlibatan orang banyak, karena pada prinsipnya kemampuan manusia selalu terbatas.

Dari tabel diatas menjelaskan juga tanggapan responden tentang peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang menyatakan sering ada 15 orang (15%), yang menyatakan kadang-kadang ada 57 orang (57%) dan yang menyatakan tidak pernah ada 28 orang (28%). Banyak responden yang menjawab kadang-kadang hal ini disebabkan masyarakat beranggapan bahwa pelaksanaan pembangunan merupakan kewajiban dari pihak pemerintah sehingga masyarakat acuh tak acuh.

Tabel 5.6. Distribusi Jawaban Responde Tentang Partisipasi Masyarakat Berupa Gotong-Royong

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1.	Sering	63	63%
2.	Kadang-kadang	24	24%
3.	Tidak pernah	13	13%
Jumlah		100	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2010

Menurut bapak Muhammad salah satu tokoh agama (wawancara, Mei 2010) mengatakan keikutsertaan masyarakat dalam gotong-royong cenderung baik meskipun hanya terlihat dalam mendirikan/memperbaiki mushalla, gedung sekolah MDA yang kebanyakan tidak terlalu banyak pihak pemerintah ikut di dalam nya

Tabel 5.6 menjelaskan juga tanggapan responden tentang partisipasi masyarakat dalam gotong-royong. Sebanyak 63 orang (63%) yang menyatakan sering berpartisipasi, 24 orang (24%) yang menyatakan kadang-kadang serta 13 orang yang menyatakan tidak pernah atau 13%. Gotong royong yang terlihat berupa perbaikan mushalla atau MDA, hal ini di karenakan mayoritas penduduk kecamatan merbau adalah muslim dan mereka berkewajiban untuk menjaga rumah ibadah atau pendidikan yang bersifat islami.

Tabel 5.7. Distribusi Jawaban Responden Tentang Pengawasan Terhadap Penempatan Tenaga Ahli.

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1.	Sering	14	14%
2.	Kadang-kadang	18	18%
3.	Tidak pernah	68	68%
Jumlah		100	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2010

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Lindawati (salah satu responden. wawancara, Mei 2010) informan mengatakan bahwa tenaga ahli yang ditunjukkan oleh pemerintah sudah mempunyai kontrak kerja dan harus menjalankan tugas mereka dengan baik. Jadi masyarakat merasa kurang perlu untuk menyumbangkan keahlian dan keterampilan yang mereka miliki.

Wawancara diatas diperkuat dengan tanggapan responden tentang pengawasan dari pihak pemerintah terhadap penempatan tenaga ahli, 14 orang yang menyatakan sering atau 14%, kadang-kadang sebanyak 18 orang atau 18%, dan 68 orang yang menyatakan tidak pernah sebanyak 68 orang atau 68%.

Tabel 5.8. Distribusi Jawaban Responden Tentang Pengawasan pelaksanaan pembangunan.

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1.	Sering	34	34%
2.	Kadang-kadang	56	56%
3.	Tidak pernah	10	10%
	Jumlah	100	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2010

Dari tabel diatas menerangkan tanggapan responden tentang pengawasan pelaksanaan pembangunan, 34 orang (34%) yang menyatakan sering, kadang-kadang 56 orang (56%), dan yang menyatakan tidak pernah sebanyak 10 orang (10%). Dalam pelaksanaan pembangunan ini sudah ditunjukkan oleh pihak pemerintah sehingga masyarakat tidak terlalu terlibat dalam pengawasan pembangunan ini.

5.2.2. Partisipasi berupa keahlian

Untuk menunjang pembangunan agar lebih baik lagi maka diperlukan staff ahli dibidang pembangunan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pelaksanaan pembangunan. Staf ahli berguna demi terwujudnya pembangunan yang dapat berdiri dengan kokoh. Disini pemerintah mengharapkan masyarakat yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidang pembangunan juga dapat menyumbangkan ide atau fikirannya. Disini masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan berupa keahlian yaitu dengan :

- Masyarakat dapat menempatkan sebagai tenaga ahli.
- Memberikan ide atau masukan yang berguna bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan.

- Dapat berperan serta dalam mengisi pembangunan dengan kemampuan yang dimiliki.
- Dapat berpartisipasi dalam penyusunan program pembangunan.
- Dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan keahlian guna memperlancar proses pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.9. Distribusi Jawaban Responden Tentang Penempatan Tenaga Ahli.

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1.	Sering	14	14%
2.	Kadang-kadang	51	51%
3.	Tidak pernah	35	35%
Jumlah		100	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2010

Berdasarkan wawancara dengan bapak Suyono salah satu tokoh masyarakat (wawancara, Mei 2010) mengatakan bahwa tenaga ahli yang ditunjukkan oleh pemerintah sudah mempunyai kontrak kerja dan harus menjalankan tugas mereka dengan baik. Jadi masyarakat merasa kurang perlu untuk menyumbangkan keahlian dan keterampilan yang mereka miliki.

Dari tabel diatas menerangkan juga tanggapan responden tentang penempatan tenaga ahli, 14 orang (14%) yang menyatakan sering, kadang-kadang 51 orang (51%), dan yang menyatakan tidak pernah sebanyak 35 orang (35%).

Tabel 5.10. Distribusi Jawaban Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Menyumbang Ide Dalam Pelaksanaan Pembangunan.

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1.	Sering	48	48%
2.	Kadang-kadang	31	31%
3.	Tidak pernah	21	21%
Jumlah		100	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2010

Dari tabel diatas menerangkan tanggapan Partisipasi Masyarakat Dalam Menyumbang Ide Dalam Pelaksanaan Pembangunan, 48 orang (48%) yang menyatakan sering, kadang-kadang 31 orang (31%), dan yang menyatakan tidak pernah sebanyak 21 orang (21%).

Tabel 5.11. Distribusi Jawaban Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Mengisi Pembangunan Dalam Berbagai Kegiatan.

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1.	Sering	50	50%
2.	Kadang-kadang	20	20%
3.	Tidak pernah	30	30%
Jumlah		100	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2010

Berdasarkan wawancara Abdul Gafur (wawancara, Mei 2010) mengatakan masyarakat selalu memanfaatkan hasil pembangunan dan masyarakat merasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Dari tabel diatas menerangkan juga tanggapan partisipasi masyarakat mengisi pembangunan dalam berbagai kegiatan, 50 orang (50%) yang menyatakan sering, kadang-kadang 20 orang (20%), dan yang menyatakan tidak pernah sebanyak 30 orang (30%).

Tabel 5.12. Distribusi Jawaban Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Program Pembangunan.

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1.	Sering	6	6%
2.	Kadang-kadang	33	33%
3.	Tidak pernah	61	61%
Jumlah		100	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2010

Dari tabel diatas menerangkan tanggapan partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan, 33 orang (33%) yang menyatakan sering, kadang-kadang 33 orang (33%), dan yang menyatakan tidak pernah sebanyak 61 orang (61%).

Tabel 5.13. Distribusi Jawaban Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1.	Sering	23	23%
2.	Kadang-kadang	59	59%
3.	Tidak pernah	18	18%
Jumlah		100	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2010

Menurut bapak Suhaimin (wawancara, Mei 2010) mengatakan bahwa masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan program pembangunan adalah masyarakat yang mengerti akan tentang arah dan tujuan pembangunan, sementara kebanyakan masyarakat yang tidak mengerti akan hal tersebut tidak terlalu peduli akan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Dari tabel diatas menerangkan juga tanggapan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan, 23 orang (23%) yang menyatakan sering, kadang-kadang 59 orang (59%), dan yang menyatakan tidak pernah sebanyak 18 orang (18%).

5.2.3. Partisipasi Berupa Dana

Dalam mewujudkan pembangunan memerlukan biaya. Dalam hal ini pemerintah menyediakan dana, peranserta masyarakat dalam pelaksanaan juga diharapkan membantu proses pembangunan agar berjalan dengan lancar. Yaitu dengan :

- Berpartisipasi berupa dana .
- Berpartisipasi dalam bentuk barang atau alat kebutuhan pelaksanaan pembangunan.
- Berpartisipasi dalam bentuk tanah.
- Sosialisasi dari pemerintah dalam bentuk penjelasan anggaran pembangunan.
- Kesiadaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam bentuk dana.

Karena tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat maka suatu pembangunan tidak akan berjalan dan tidak akan berhasil. Dalam partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan dana masih kurang.hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 5.14. Distribusi Jawaban Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Dana..

No..	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1.	Sering	32	32%
2.	Kadang-kadang	51	51%
3.	Tidak pernah	17	17%
Jumlah		100	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2010

Hasil wawancara dengan bapak Suyatno,SPd yang merupakan kepala Desa Kelurahan Teluk Belitung(wawancara, Mei 2010) mengatakan keterbatasan untuk

memenuhi kebutuhan hidup membuat masyarakat sulit untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk dana, kebanyakan kerja masyarakat sehari-hari hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan pandangan masyarakat terhadap pembangunan hanyalah merupakan tugas dari aparat pemerintah itu sendiri.

Tabel diatas menjelaskan juga tanggapan responden tentang partisipasi masyarakat dalam bentuk dana, yang menyatakan sering ada 32 orang (32%), yang menyatakan kadang-kadang ada 51 orang (51%) dan yang menyatakan tidak pernah ada 17 orang (17%).

Tabel 5.15. Distribusi Jawaban Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Berupa Barang Atau Alat Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan.

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1.	Sering	33	33%
2.	Kadang-kadang	54	54%
3.	Tidak pernah	11	11%
Jumlah		100	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2010

Dari tabel diatas menerangkan tanggapan responden tentang partisipasi masyarakat berupa barang atau alat kebutuhan pelaksanaan pembangunan, 33 orang (33%) yang menyatakan sering, kadang-kadang 54 orang (54%), dan yang menyatakan tidak pernah sebanyak 11 orang (11%).

Tabel 5.16. Distribusi Jawaban Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Menyumbang Tanah.

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1.	Sering	25	25%
2.	Kadang-kadang	51	51%
3.	Tidak pernah	24	24%
Jumlah		100	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2010

Tabel 5.16 menjelaskan tanggapan responden tentang partisipasi masyarakat dalam menyumbang tanah. Sebanyak 25 orang (25%) yang menyatakan sering berpartisipasi, 51 orang (51%) yang menyatakan kadang-kadang serta 24 orang yang menyatakan tidak pernah atau 24%.

Tabel 5.17. Distribusi Jawaban Responden Tentang Sosialisasi Pemerintah Dalam Bentuk Penjelasan Anggaran.

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1.	Sering	20	20%
2.	Kadang-kadang	17	17%
3.	Tidak pernah	63	63%
Jumlah		100	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2010

Berdasarkan wawancara bapak Kaharudin (wawancara, Mei 2010) mengatakan pemerintah sangat tidak transparansi dalam sosialisasi pelaksanaan pembangunan, apalagi dalam penjelasan anggaran. Pemerintah sangat jarang menjelaskan tentang anggaran yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan.

Tabel diatas menjelaskan tanggapan responden tentang sosialisasi pemerintah dalam bentuk penjelasan anggaran, 20 orang (20%) yang menyatakan sering, kadang-kadang 17 orang (17%), dan yang menyatakan tidak pernah sebanyak 63 orang (63%).

Tabel 5.18. Distribusi Jawaban Responden Tentang kesediaan Masyarakat Dalam Menyumbang Dana.

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1.	Sering	5	5%
2.	Kadang-kadang	28	28%
3.	Tidak pernah	67	67%
Jumlah		100	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2010

Menurut bapak Muhamad Yusuf (wawancara, Mei 2010) mengatakan keterbatasan ekonomi dan pengetahuan masyarakat tentang tujuan pembangunan membuat masyarakat sulit untuk berpartisipasi dalam menyumbangkan dana untuk pembangunan, sehingga ketika ada pembangunan yang membutuhkan dana dari masyarakat, masyarakat itu sulit untuk memenuhinya.

Dari tabel diatas menjelaskan juga tanggapan responden tentang kesediaan masyarakat dalam menyumbang dana, 5 orang yang menyatakan sering atau 5%, kadang-kadang sebanyak 28 orang atau 28%, dan 67 orang yang menyatakan tidak pernah atau 68%.

5.3. Analisa Indikator Variabel Penelitiann

Adapun variabel penelitian dan indikator penelitian nya sebagai berikut :

1. Partisipasi Dalam Bentuk Tenaga

Adapun yang menjadi indikator pada variabel ini terlihat pada tabel 5. 19 berikut :

Tabel 5.19. Indikator Partisipasi Berupa Tenaga

No.	Indikator Variabel	S	KK	TP	Persentase
1.	Partisipasi Langsung Dalam Kegiatan Pembangunan	29	50	21	100
2.	Peran Aktif Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan	15	57	28	100
3.	Partisipasi Masyarakat Berupa Gotong-Royong.	63	24	13	100
4.	Pengawasan Terhadap Penempatan Tenaga Ahli	14	18	68	100
5.	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan.	34	56	10	100

Sumber : Data Olahan Tahun 2010

Pada tabel diatas terlihat dengan jelas indikator-indikator variabel ini sangat bervariasi, dimana partisipasi langsung rata-rata 29 responden dari 100 sampel yang sering ikut berpartisipasi secara langsung, 50 responden yang mengatakan kadang-kadang, dan 21 responden yang menyatakan tidak pernah berpartisipasi secara langsung.

Peran aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan dengan rata-rata 15 responden yang ikut berperan aktif dalam kegiatan pembangunan 57 reponden yang menyatakan kadang-kadang dan 28 reponden yang menyatakan tidak pernah berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Partisipasi masyarakat berupa gotong-royong dengan rata-rata 63 responden yang menyatakan sering berpartisipasi berupa gotong-royong 24 responden yang mengatakan kadang-kadang dan 13 responden yang menyatakan tidak pernah ikut berpartisipasi berupa gotong-royong.

Pengawasan Terhadap Penempatan Tenaga Ahli dengan rata-rata 14 responden yang menyatakan sering, 18 responden yang menyatakan kadang-kadnag dan 68 responden yang menyatakan tidak pernah.

Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dengan rata-rata 34 responden yang menyatakan sering 56 responden yang menyatakan kadang-kadang dan 10 responden yang mengatakan tidak pernah.

2. Partisipasi Dalam Bentuk Keahlian

Tabel 5.20. Indikator Partisipasi dalam Bentuk Keahlian

No.	Indikator Variabel	S	KK	TP	Persentase
1.	Penempatan Tenaga Ahli.	14	51	35	100
2.	Partisipasi Masyarakat Dalam Menyumbang Ide Dalam Pelaksanaan Pembangunan.	48	31	21	100
3.	Partisipasi Masyarakat Mengisi Pembangunan Dalam Berbagai Kegiatan	50	20	30	100
4.	Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Program Pembangunan	6	33	61	100
5.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan	23	59	18	100

Sumber : Data Olahan Tahun 2010

Pada tabel diatas dapat dijelaskan indikator variabel partisipasi berupa keahlian, dimana dalam hal penempatan tenaga ahli rata-rata 14 responden yang menyatakan sering, 51 responden yang menyatakan kadang-kadang dan 35 responden yang menyatakan tidak pernah.

Partisipasi Masyarakat Dalam Menyumbang Ide Dalam Pelaksanaan Pembangunan dengan rata-rata 48 responden yang menyatakan sering, 31 responden yang menyatakan kadang-kadang dan 21 responden yang menyatakan tidak pernah menyumbangkan ide dalam pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi Masyarakat Mengisi Pembangunan Dalam Berbagai Kegiatan rata-rata 50 responden yang menyatakan sering, 20 yang menyatakan kadang-kadang dan 30 responden yang menyatakan tidak pernah mengisi pembangunan dengan berbagai kegiatan.

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Program Pembangunan dengan rata-rata 6 responden yang menyatakan sering, 33 responden yang menyatakan kadang-kadang dan 61 responden yang menyatakan tidak pernah berpartisipasi dalam penyusunan program pembangunan.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan dengan rata-rata 23 responden yang menyatakan sering, 59 responden yang menyatakan kadang-kadang dan 18 responden yang menyatakan tidak pernah berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan.

3. Partisipasi Dalam Bentuk Dana

Tabel 5.21. Indikator Partisipasi dalam Bentuk Dana

No.	Indikator Variabel	S	KK	TP	Persentase
1.	Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Dana	32	51	17	100
2.	Partisipasi Masyarakat Berupa Barang Atau Alat Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan	33	54	11	100
3.	Partisipasi Masyarakat Dalam Menyumbang Tanah	25	51	24	100
4.	Sosialisasi Pemerintah Dalam Bentuk Penjelasan Anggaran	20	17	63	100
5.	kesediaan masyarakat dalam menyumbang dana	5	28	67	100

Sumber : Data Olahan Tahun 2010

Pada tabel 5.21. dapat dijelaskan indikator-indikator variabel, dimana Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Dana dengan rata-rata 32 responden yang menyatakan sering, 51 responden yang menyatakan kadang-kadang dan 17 responden yang menyatakan tidak pernah ikut berpartisipasi dalam bentuk dana.

Partisipasi Masyarakat Berupa Barang Atau Alat Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan dengan rata-rata 33 responden yang menyatakan sering, 54 responden yang menyatakan kadang-kadang dan 11 responden yang menyatakan

tidak pernah berpartisipasi dalam bentuk alat atau barang kebutuhan pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi Masyarakat Dalam Menyumbang Tanah rata-rata sebanyak 25 responden menyatakan sering, 51 responden yang menyatakan kadang-kadang dan sebanyak 24 responden yang menyatakan tidak pernah berpartisipasi dalam menyumbangkan tanah.

Sosialisasi Pemerintah Dalam Bentuk Penjelasan Anggaran dengan rata-rata 20 responden yang menyatakan sering, 17 responden yang menyatakan kadang-kadang dan 63 responden yang menyatakan tidak pernah pemerintah bersosialisasi dalam bentuk penjelasan anggaran pembangunan.

Kesediaan masyarakat dalam menyumbang dana dengan rata-rata 5 responden yang menyatakan sering, 28 responden yang menyatakan kadang-kadang dan 67 responden yang menyatakan tidak pernah.

D. Hambatan-Hambatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan:

1. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Semakin rendah tingkat pendidikan suatu kelompok masyarakat maka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan lingkungannya. Pendidikan merupakan suatu tolak ukur dalam kegiatan pembangunan, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pembangunan maka akan sulit untuk mencapai pembangunan yang maksimal.

2. Jenis Kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya. Sementara masyarakat yang memiliki usia lanjut sangat sulit untuk ikut secara bersama dalam kegiatan kemasyarakatan.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab v mengenai Analisis Partispasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan Merbau, maka dapat penulis tarik beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Partisipasi Dalam Bentuk Tenaga

Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga yang diamati melalui partisipasi masyarakat secara langsung dalam kegiatan pembangunan, peran masyarakat dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong-royong, pengawasan terhadap penempatan tenaga ahli, dan partisipasi dalam kegiatan pengawasan pelaksanaan pembangunan masih rendah, ini dibuktikan besarnya persentase kemungkinan dan tidak pernah ikut serta dalam partisipasi bentuk tenaga.

2. Partisipasi Dalam Bentuk Keahlian

Partisipasi masyarakat dalam bentuk keahlian yang diamati melalui partisipasi dalam penempatan tenaga ahli, partisipasi masyarakat dalam menyumbang ide dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat mengisi pembangunan dalam berbagai kegiatan, partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan masih terlihat rendah, artinya

masyarakat masih belum begitu optimal berpartisipasi dalam pembangunan.

3. Partispasi Dalam Bentuk Dana

Partispasi masyarakat dalam bentuk dana yang diamati melalui partisipasi masyarakat dalam bentuk dana, partisipasi masyarakat berupa barang atau alat kebutuhan pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam menyumbang tanah, dan sosialisasi pemerintah dalam bentuk penjelasan anggaran, kesediaan masyarakat dalam menyumbang dana masih rendah.

6.2. Saran

Rendahnya dan kurang begitu optimal partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Merbau perlu diperbaiki dan ditata ulang dengan baik yaitu :

1. Dalam Bentuk Partispasi Berupa Tenaga

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga pihak pemerintah beserta tokoh masyarakat hendaknya menjelaskan manfaat yang dihasilkan dari pembangunan serta lebih giat lagi memotivasi kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi.

2. Dalam Bentuk Partispasi Berupa Keahlian

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat berupa keahlian, pemerintah maupun tokoh masyarakat seharusnya lebih mengerti dan memahami penempatan dan penggunaan keahlian pada bidang yang dikerjakan dan ikut melibatkan masyarakat dalam mengawasi dan mengamati penggunaan

keahlian dalam pembangunan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran penting masyarakat dalam pembangun.

3. Dalam Bentuk Partisipasi Berupa Dana

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemberian dana secara langsung maupun tidak langsung seharusnya pemerintah beserta tokoh masyarakat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pembangunan akan dapat dilaksanakan dengan bantuan dari semua elemen karena apabila ada benturan-benturan dalam pembangunan akan menyebabkan lambatnya laju pembangunan di suatu daerah selain itu diperlukan peran pemerintah dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan masyarakat baik formal maupun nonformal.

Daftar pustaka

- Mudrajat Kuncoro, Ph.d (UGM), "Otonomi Dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan Strategi Dan Peluang", PT. Erlangga, Jakarta, 2004.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta. Bumi Aksara.
- , 1987. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Rasyid Ryaas muhammad, "*makna pemerintahan ditinjau dari segi etika dan kepemimpinan* ", PT. Yasrif watampone, jakarta, 1997.
- Siagian P Sondang, MPA, "*Administrasi Pembangunan* ", Gunung Agung, Jakarta, 2005.
- , 1999. *Filsafat Administrasi*. Jakarta.
- Sastropoetra, 1988. *Partisipasi Komunikasi Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Bandung : Alumni.
- Slamat, Margono, 1990. *Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Desa*. Malang : LPM Universitas Brawijaya.
- Sudria munawar haryono, "*Kepemimpinan, Peranserta dan Produktivitas*", Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Surjono Agus Trilaksono Nugroho, "*Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, Dan Pemberdayaan Masyarakat Diera Otonomi Daerah*", Lembaga Penerbitan Dan Dokumentasi FIA-UNIBRAW. 2008.
- Tjokroamidjojo Bintaro, "*Pengantar Administrasi Pembangunan*", PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2005.
- , 1996. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta. PT. Toko Gunung Agung.
- Thoha Miftah, "*Kepemimpinan Dalam Manajemen*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Dokumentasi

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah